

KAJIAN EKONOMI DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Anhar Drakel

Institut Sains Dan Kependidikan (ISDIK) Kie Raha Maluku Utara

Email: anharrakel29@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan lingkungan timbul karena adanya interaksi antara aktifitas ekonomi dan eksistensi sumberdaya alam. Semakin besar jumlah dan intensitas eksploitasi sumberdaya alam itu, dampaknya terhadap degradasi kualitas lingkungan (environmental degradation) juga cenderung meningkat. Dampak atau efek samping (side effects / externalities) tersebut mencakup ruang dan waktu. Selain itu, dampak lingkungan tidak hanya berdampak lokal, regional, dan global, tetapi juga berdampak jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang terhadap lingkungan. Adapun permasalahan dalam kajian ini sebagai berikut ini: (1) Perspektif ekonomi dan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam (2) Masalah lingkungan (3) Dampak akibat kerusakan lingkungan terhadap perekonomian dan masyarakat (4) Implikasi kebijakan pengendalian kualitas lingkungan. Adapun tujuan kajian ini sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi dan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam. (2) Mengkaji Dampak akibat kerusakan lingkungan terhadap perekonomian dan masyarakat (3) Mengetahui dan menelaah kebijakan yang perlu dalam pengendalian kualitas lingkungan. Perhatian terhadap masalah lingkungan masih belum banyak. Perumusan kebijakan dan pelaksanaannya masih perlu dikembangkan dan disempurnakan lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu dukungan berbagai unsur dalam masyarakat agar upaya pembangunan yang berwawasan lingkungan itu bisa diwujudkan. Peranan dan kehendak politik pemerintah merupakan kunci utama keberhasilannya, selain dukungan dan peran serta lembaga lain seperti pelaku ekonomi khususnya produsen di bidang industri maupun pertanian, lembaga swadaya masyarakat, media massa, yang secara bersama-sama dengan dukungan dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Kajian Ekonomi, Pengendalian Kerusakan, Lingkungan Hidup

ABSTRACT

Environmental problems arise due to the interaction between economic activities and the existence of natural resources. The greater the amount and intensity of exploitation of natural resources, the impact on environmental degradation also tends to increase. The impacts or side effects (externalities) cover space and time. In addition, environmental impacts not only have local, regional, and global impacts, but also have short-term, medium-term, and long-term impacts on the environment. The problems in this study are as follows: (1) Economic and environmental perspectives on the use of natural resources (2) Environmental problems (3) Impacts of environmental damage on the economy and society (4) Implications of environmental quality control policies. The objectives of this study are as follows: (1) To find out how the economic and environmental perspectives are in the utilization of natural resources. (2) To examine the impact of environmental damage on the economy and society (3) To know and examine the policies needed in controlling environmental quality. Attention to environmental problems is still lacking. Policy formulation and implementation still need to be developed and refined further. Therefore, support from various elements in society is needed so that environmentally conscious development efforts can be realized. The role and political will of the

government are the main keys to its success, in addition to the support and participation of other institutions such as economic actors, especially producers in the industrial and agricultural sectors, non-governmental organizations, mass media, which together with the support and participation of the community.

Keyword: *Economic Studies, Damage Control, Environment*

PENDAHULUAN

Tidak ada kiranya permasalahan yang paling menonjol pada masa kini dan masa yang akan datang, selain permasalahan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Karena permasalahan tersebut baik terjadi di negara/wilayah berkembang maupun di negara/wilayah yang sudah maju. Sedangkan lingkungan hidup sebenarnya merupakan matriks fisik dan pada beberapa sumber daya alam dalam suatu tatanan ruang yang terbatas, baik yang meliputi dikawasan perkotaan (urban) maupun diwilayah (supra urban). Dalam hubungan dengan permasalahan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ini, diperkirakan bahwa nasib kemanusiaan sekarang sedang dihadapkan kepada permasalahan yang sangat besar. Masalah ini muncul sebagai akibat dari terjadinya kemelut dari berbagai degradasi jenis sumber-sumberdaya alam dan lingkungan hidup tersebut seperti yang terjadi pada masalah wilayah pertambangan, perairan pantai, perairan lepas pantai, hutan udara dll. Padahal di lain pihak, sumberdaya alam dan lingkungan hidup ini merupakan tempat bergantungnya banyak kehidupan umat manusia baik yang pernah ada maupun yang sekarang masih hidup di semua lokasi tempat kehidupan yang terdapat pada planet bumi yang terbatas ini. Oleh karena itu maka sudah sayogyanya kita semua secara bersama-sama mempunyai perhatian dan keterlibatan yang mendalam, agar pada akhirnya. dapat membentuk rasa saling ketergantungan dan kebersamaan satu sama lain yang sangat erat, sehingga secara bersama-sama kita dapat memberi perhatian untuk mengarahkan kepada pencapaian satu tujuan bersama, yaitu: untuk menjaga keselamatan nasib umat manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi ini.

Seperti dapat disaksikan dalam media masa baik di dalam maupun luar negeri, maka hampir setiap hari kita dihadapkan kepada berbagai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, yang sebenarnya dapat dirasakan oleh setiap orang dan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berhubung karena persoalan yang menyangkut sumberdaya alam dan lingkungan hidup berlaku di setiap negara, tidak terkecuali apakah negara tersebut kaya atau miskin, maka degradasi sumber-sumberdaya alam dan lingkungan hidup persoalannya lebih tersebar di semua negara, jika dibandingkan dengan permasalahan ekonomi lainnya, seperti hutang luar negeri ataupun inflasi yang melanda perekonomian di beberapa negara. Kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dapat dilihat meliputi antara lain: kerusakan hutan, wilayah pertambangan, kehilangan keragaman biologi (biodiversity), erosi tanah/lahan yang berlebihan. Kerusakan lahan yang dicirikan oleh meluasnya padang alang-alang, kelebihan tangkapan ikan (over fishing), pencemaran udara, kemacetan lalu lintas di kota-kota besar, yang di antaranya dapat berdimensi lokal, regional maupun global.

Semua kejadian di atas seakan-akan merupakan gejala yang tampaknya seperti sudah menjadi lumrah (biasa), yang sebenarnya dapat disaksikan dan terdapat di semua wilayah maupun negara baik seperti di kawasan ASEAN, ataupun kawasan-kawasan lainnya di dunia. Demikian juga, terjadinya kemandekan ekonomi (economic stagnation) yang terutama sekarang terdapat di negara-negara Afrika; serta beban-beban berat hutang luar negeri yang harus ditanggung oleh banyak negara-negara miskin di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Semuanya merupakan sebagai akibat dari salah satu persoalan yang sumber penyebabnya dapat menyangkut dan berkaitan dengan sumberdaya alam; seperti apa yang disebut "Penyakit Belanda" atau Dutch Disease. Gejala penyakit Belanda ini terjadi pada negara-negara penghasil sumberdaya alam yang pernah mengalami "rejeki nomplok", karena suatu waktu terjadi kenaikan harga-harga sumberdaya alam yang tinggi seperti harga minyak bumi atau gas alam, seperti yang terjadi pada permulaan dasawarsa 1970-an. Akan tetapi setelah harga-harga sumberdaya alam tersebut menjadi turun anjlok, maka banyak negara-negara yang bersangkutan sulit sekali untuk melaksanakan berbagai penyesuaian-penyesuaian dengan keadaan ekonomi yang baru (economic adjustment).

Hutang-hutang negara berkembang sekarang secara kumulatif telah melebihi satu triliun dollar, sehingga pembayaran untuk suku bunganya saja pada permulaan 1980-an telah mencapai \$ 60 milyar per tahun. Dengan demikian aliran bersih (net-flow) dari dana modal yang dulunya mengalir dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang, tetapi sejak tahun 1982 sampai sekarang sudah berbalik, yaitu telah mencapai transfer yang melebihi dari \$ 45 milyar per tahun ke arah jurusan yang sebaliknya, yaitu dari negara miskin ke negara kaya. Aliran pembayaran hutang-hutang tersebut sekarang harus dibayarkan oleh negara berkembang yang miskin di selatan ke negara kaya di utara (Scientific American 1990)

Demikian juga pertumbuhan penduduk dunia yang sekarang dihuni oleh sekitar 5.6 milyar manusia telah bertumbuh dengan kecepatan yang setiap dekade akan berlipat lebih kurang dua kali. Menurut Bagian Populasi Perserikatan Bangsa-bangsa menjelang tahun 2025 diproyeksikan penduduk dunia akan mencapai 8.5 milyar dan 95% dari jumlah tersebut akan menghuni negara-negara berkembang. Ditambah dengan tingkat konsumsi sumberdaya alam yang tidak merata, bahkan mencapai tingkat keganjilan yang sangat asimetrik, di mana kurang lebih manusia di negara-negara maju sebanyak hanya sekitar 1 milyar mengkonsumsi sumberdaya dunia sekitar 80%; sedangkan sebagian besar 4.6 milyar sisanya hanya mengkonsumsi 20% sumberdaya dunia, sehingga kehidupan mereka kebanyakan masih berada dalam kemiskinan. Demikian juga keganjilan tersebut berlaku di negara-negara berkembang seperti Indonesia di mana penyebaran baik yang menyangkut kekuasaan, konsentrasi penduduk maupun kelayakan ekonomi dapat disaksikan keadaannya juga telalu memusat pada suatu wilayah atau lokasi tertentu. Struktur asimetrik (asymetric structure) yang demikian akan menyebabkan terjadinya kemubaziran dan/atau pemborosan sumberdaya alam di negara/wilayah yang maju dan sebaliknya terjadi kemiskinan di negara/wilayah kurang berkembang, yang pada gilirannya mempunyai implikasi terhadap percepatan terjadinya degradasi sumber-sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dari sudut ekonomi, meskipun pertumbuhan ekonomi secara potensial dapat mendorong suatu negara (atau wilayah dalam negara), guna mampu untuk mengatasi permasalahan yang menyangkut pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara lebih efektif, tetapi dari pelajaran dan pengalaman-pengalaman yang berasal dari banyak negara-negara dan wilayah-wilayah, telah diperoleh kesan yang memperlihatkan

bahwa kenyataan yang terjadi menunjukkan lebih banyak pengalaman yang menemui kegagalan-kegagalan dalam mengatasi masalah pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup tersebut, dari pada yang telah berhasil. Dalam menghadapi masalah ini ternyata bahwa negara atau daerah yang telah berhasil dengan baik (sukses) dalam mengatasi masalah tersebut adalah jumlahnya hanya sedikit saja, yaitu hanya beberapa negara atau lokasi wilayah yang mempunyai kemampuan untuk menanggulangi atau mengatasi permasalahan tersebut. Adanya bukti-bukti ini menimbulkan beberapa implikasi, antara lain bahwa:

1. Diperkirakan ada akar yang menjadi penyebab dari permasalahan yang timbul. Meskipun adat dan kebudayaan antar negara-negara atau antar daerah/wilayah dalam suatu negara berbeda-beda, tetapi dapat disaksikan adanya kesamaan-kesamaan dalam menimbulkan terjadinya kegagalan dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
2. Pertumbuhan ekonomi sendiri sebenarnya bukan merupakan penyebab atau akibat dari terjadinya degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Tetapi yang menjadi penyebab sebenarnya adalah bahwa di antara keduanya mempunyai hubungan-hubungan yang sangat muskil dan kompleks.

PERMASALAHAN

Persoalan utamanya disebabkan karena belum atau kurang banyak dipahami tentang bentuk hubungan antara faktor-faktor yang menimbulkan dan akibat dari degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, sehingga akibatnya penanggulangan masalah sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi terabaikan. Atau, walaupun ada yang dilakukan oleh beberapa pihak-pihak, maka tidak sedikit bahwa negara/wilayah dan masyarakat yang bersangkutan hanya mencoba untuk menanggulangi persoalan tersebut dengan hanya mengatasi gejala permukaannya saja, dan kebanyakan tidak menyentuh akar permasalahannya dalam rangka pemecahan persoalan atau mengatasi penyebab dasarnya. Adapun masalah yang diangkat dalam kajian ini sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi dan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam. (2) Mengkaji Dampak akibat kerusakan lingkungan terhadap perekonomian dan masyarakat (3) Mengetahui dan menelaah kebijakan yang perlu dalam pengendalian kualitas lingkungan.

TEORI EKONOMI DAN LINGKUNGAN

Ekonomi Lingkungan adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari hubungan timbal balik antara ekonomi dan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan manusia. Teori ini menekankan bahwa fasilitas lingkungan memiliki nilai ekonomi dan bahwa pertumbuhan ekonomi seringkali menimbulkan biaya lingkungan yang tidak diperhitungkan dalam model ekonomi tradisional.

Teori nilai ekonomi lingkungan adalah cabang ekonomi yang mempelajari interaksi antara manusia, sumber daya alam, dan lingkungan, serta bagaimana nilai ekonomi dapat diukur dan dikelola untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Teori ini menekankan bahwa sumber daya alam dan lingkungan memiliki nilai ekonomi yang signifikan, baik dalam penggunaan langsung maupun manfaat yang tidak langsung.

Nilai Ekonomi Lingkungan:

1. Nilai Penggunaan (Use Value): Nilai yang didapatkan dari pemanfaatan langsung sumber daya alam, seperti produksi pertanian, pertambangan, atau pariwisata.
2. Nilai Non-Penggunaan (Non-Use Value): Nilai yang didapatkan dari keberadaan sumber daya alam, meskipun tidak digunakan secara langsung, seperti nilai keberadaan ekosistem, nilai eksistensi, dan nilai opsi.

Elemen-elemen Penting dalam Teori Ekonomi Lingkungan:

1. Nilai Ekonomi Lingkungan: Lingkungan memiliki nilai ekonomi, baik langsung (misalnya, nilai sumber daya alam) maupun tidak langsung (misalnya, nilai ekosistem untuk jasa-jasa lingkungan).
2. Eksternalitas: Aktivitas ekonomi sering menimbulkan eksternalitas negatif, yaitu dampak pada pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam transaksi, seperti polusi atau deforestasi.

Kegagalan Pasar: Pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam seringkali merupakan kegagalan pasar, di mana mekanisme pasar tidak mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan.

1. Keberlanjutan: Ekonomi Lingkungan menekankan pentingnya keberlanjutan, yaitu penggunaan sumber daya alam dan lingkungan secara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang.
2. Kebijakan Lingkungan: Teori ini juga membahas berbagai kebijakan lingkungan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan, seperti pajak, kuota, dan subsidi.

Evaluasi Biaya dan Manfaat:

Ekonomi Lingkungan sering menggunakan analisis biaya-manfaat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan lingkungan dan untuk mengidentifikasi solusi yang paling efektif.

Adapun teori Ekonomi Lingkungan sebagai berikut:

1. Penetapan Harga Karbon: Menetapkan harga karbon (pajak atau kuota) untuk mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca.
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Menggunakan pendekatan ekonomi untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, misalnya dalam pengelolaan hutan atau perikanan.
3. Pengendalian Polusi: Menggunakan insentif ekonomi untuk mendorong perusahaan mengurangi polusi, misalnya melalui subsidi atau pajak polusi.

Ekowisata.

Mengembangkan ekowisata sebagai cara untuk menghasilkan pendapatan dari lingkungan sekaligus melindungi ekosistem. Ekonomi Lingkungan memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami hubungan antara ekonomi dan lingkungan serta untuk mengembangkan kebijakan dan praktik yang berkelanjutan. Teori ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus dilakukan secara bertanggung jawab terhadap lingkungan untuk memastikan kesejahteraan manusia dan kelestarian alam.

PEMBAHASAN KAJIAN

KAJIAN EKONOMI TERHADAP DEGRADASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP.

Degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup sampai suatu batas tertentu sebenarnya tidak dapat dicegah, karena mau tidak mau merupakan proses alamiah yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Setiap usaha eksploitasi sumberdaya alam yang tidak dapat pulih (non renewable resource) seperti dalam pengambilan bahan tambang dapat berakibat cadangannya menjadi habis sama sekali atau sebagian. Eksploitasi sumberdaya alam juga dapat merusak pemandangan (landscape) dan akan selalu menghasilkan limbah, seperti yang diramalkan oleh teori entrophy. Kegiatan industrialisasi yang sudah thalami sekarang mengarah kepada peningkatan konsumsi mineral dan energi yang juga menghasilkan pencemaran udara, air dan limbah berbahaya. Limbah berbahaya seperti dioxin, meskipun dapat didaur ulang (recyde), biayanya akan terlalu mahal sehingga tidak mungkin dilakukan daur ulang lagi. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian juga membawa konsekuensi terjadinya pencemaran pestisida, pupuk dan deforestasi karena perluasan lahan pertanian harus membuka hutan dengan menebang pohon`-pohon hutan primer (perluasan frontir lahan pertanian).

Sementara intensifikasi pertanian dapat meningkatkan produktivitas dengan peningkatan jumlah tenaga kerja dan modal yang terserap, tetapi sebagai akibatnya dapat menimbulkan aliran permukaan (run off) dari larutan pestisida dan pupuk, water logging dan salinisasi lahan (tanah). Eksploitasi dan penggunaan sumberdaya'dapat pulih (renewable resources) berdasarkan prinsip keberlanjutan (sustainability), tetapi jika tingkat pemanenannya tidak terlalu banyak, maka akan mengarah kepada tingkat produksi hasil per tahun yang maksimum, yang secara alamiah sumberdaya perikanan yang belum terjamah maupun hutan perawan pada akhirnya akan mencapai ke tingkat keseimbangan cadangannya yang menghasilkan pertumbuhan bersih ke arah nol. Oleh karena itu, kecuali cadangan atau stock tersebut diambil melalui pemanenan yang sesuai dengan daya regenerasinya, maka tidak akan dicapai tingkat pemanenan (hasil tangkapan) yang lestari (sustainable yield) Dengan demikian, persoalan pengelolaan bukan untuk mencegah atau menghilangkan degradasi sumberdaya alam secara ketat, melakukan bagaimana untuk mengurangi atau setidaknya memelihara tingkat pemanenan yang dapat mendistribusikan secara konsisten dengan tujuan-tujuan umum masyarakat seperti mencapai tatanan masyarakat yang adil dan makmur, gemah ripah yang berkelanjutan.

Dengan perkataan lain, dalam mencapai tujuan tersebut, maka secara rasional tidak logislah jika degradasi sumberdaya alam harus dicegah sama sekali. Beberapa penebangan hutan sebenarnya dapat diizinkan, sejauh apabila lahan hutan yang bersangkutan dapat dimanfaatkan secara lebih baik mengarah ke (superior uses) setelah memperhitungkan faktor opportunity costnya. Tetapi dikebanyakan di wilayah kepulauan Indonesia, umumnya telah terjadi penggundulan lahan hutan ke arah terbentuknya lahan-lahan yang menjadi tandus, sehingga kebanyakan lahan tersebut tidak berguna lagi.

Contoh dari pengalaman sejarah menunjukkan bahwa di beberapa benua seperti di Asia dan Afrika telah terjadi perluasan padang pasir (desertification) seperti yang di alami oleh bekas kota Carthago di Afrika Utara yang dulunya merupakan gudang gandum kerajaan Romawi dan tempat kaisar Roma berburu singa, tetapi sekarang menjadi padang pasir. Demikian juga kota Babilonia yang terkenal dengan keajaibanya, sekarang telah hancur karena terlalu banyak mengeksploitasi sumberdaya alam dari wilayah hinterlandnya secara berlebihan.

Pencemaran udara dan air jika jumlahnya sedikit sebetulnya dapat dilarutkan oleh udara dan badan air, karena udara dan air mempunyai daya asimilasi. Akan tetapi jika pencemaran tersebut menjadi berlebihan yang melampaui daya kemampuan asimilasinya, maka udara dan air tidak lagi mampu untuk melarutkan polutan yang terlalu banyak, sehingga menjadi berbahaya bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu persoalannya menjadi: Mengapa keadaan-keadaan ini terjadi?. Di bawah ini selanjutnya akan diterangkan bahwa dengan peralatan analisis pengaruh keluar atau externaliti: yang menjadi faktor pendorong untuk dilakukan tindakan penanganannya, masalah sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dihadapi. Tetapi bagaimana cara penanggulangan tersebut dilakukan, harus didasarkan, kepada kriteria cost-effectiveness, yaitu lebih baik kita melakukan pencegahan degradasi tersebut sejak dini, dibandingkan dengan melakukan rehabilitasi sumberdaya alam yang telah rusak yang biasanya sangat tinggi. Tetapi yang menjadi masalah adalah sekali degradasi sumberdaya alam terjadi dan berlangsung, maka banyak golongan vested interest yang disebut golongan pencari surplus keuntungan (rent seekers), di mana mereka juga posisinya sangat kuat. Mereka sering menghendaki berlangsungnya eksploitasi sumberdaya alam, termasuk dalam penebangan kayu tropis yang menguntungkan golongan tersebut dalam jangka pendek. Padahal apabila kecepatan penggundulahan hutan atau terjadinya overfishing di lautan berjalan terus seperti sekarang, maka akan berbahaya bagi kelestarian sumberdaya dan lingkungan dalam jangka panjang. Kesulitan dalam upaya perbaikan demikian terjadi karena hal-hal istimewa dipegang oleh golongan pengusaha kuat atau pejabat yang berwenang dalam penentuan keputusan sumberdaya alam selalu cenderung melakukan aktivitas rent seeking (political maneuvers, lobbying) untuk mempertahankan rent surplus ekonomi yang selama ini dinikmatinya, sehingga mereka tidak mau kehilangan begitu saja keuntungan yang diperoleh selama ini, dengan terjadinya perubahan kebijaksanaan; meskipun perubahan tersebut akan membawa perbaikan kepada masyarakat yang lebih luas. Aktivitas rent seeking ini menimbulkan kerugian kepada masyarakat yang telak dan disebut sebagai deadweight social loss yang setara dengan kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh adanya praktek monopoli dalam ekonomi. Oleh karenanya, maka perubahan kebijaksanaan untuk mengurangi degradasi sumberdaya alam dan lingkungan ke tingkat optimal akan selalu mengalami kesulitan dan memakan waktu yang cukup lama yang biasanya dilakukan secara bertahap. Karena terjadinya rent seeking tersebut sering dilakukan oleh golongan vested interest dengan cara mengemukakan berbagai dalih untuk mencegah terjadinya perubahan kebijaksanaan kearah perbaikan ekonomi, maka tanpa memikirkan kebijaksanaan yang tepat waktu, seringkali perubahan kebijaksanaan mengalami kegagalan. Suatu contoh aktual yang berkaitan dengan aktivitas rent seeking adalah dalam hal deregulasi menyangkut sektor riil terhadap proteksi dalam bidang pasokan otomotif kendaraan impor yang memakan waktu panjang. Kadaan ini disebabkan karena pihak-pihak yang pernah diuntungkan oleh adanya kebijaksanaan

proteksi itu tidak rela keuntungan (economic rent) yang telah diperoleh akan hilang begitu saja oleh perubahan karena deregulasi.

Kembali pada persoalan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, jika diinginkan terjadinya pembersihan pencemaran lingkungan sampai mencapai 100%, hal ini bukan saja secara teknis sulit untuk dilaksanakan, tetapi juga secara ekonomis mustahil untuk dilakukan. Oleh karenanya, tingkat pencemaran optimal secara ekonomis tidak dapat dihindarkan, jika kita tidak ingin bahwa pencemaran tersebut terus bertambah buruk ke arah tingkat yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya maka sekarang kita berada di persimpangan jalan yang dihadapkan kepada alternatif pilihan-pilihan apakah segera untuk memulainya melakukan perbaikan atau membiarkannya pencemaran dan degradasi tersebut terus berlangsung. Sedangkan dalam beberapa tahap perkembangan sumberdaya alam yang terjadi mungkin sudah dan dapat mengarah kepada terjadinya keadaan irreversibility secara ekonomis. Sehingga tingkat ambang ini seharusnya mulai ditetapkan sebelum terjadi irreversibility secara fisik, dengan melalui cara-cara menginternalisasikan biaya-biaya lingkungan ke arah keadaan yang lebih dikehendaki. Biaya-biaya lingkungan memang sebenarnya dapat di internalisasikan, apabila tindakan pihak-pihak yang menjadi penyebab timbulnya pencemaran harus memperhitungkannya atau pemerintah dapat secara efektif memaksakan peraturan (enforceable) dengan suatu organisasi kelembagaan yang efisien; dan bukannya dibiarkan sehingga akibatnya menimpa kepada orang-orang yang tidak berdosa (yang tidak ada kaitannya dengan aktivitas yang bersangkutan) yang harus menanggungnya. Cara lain untuk mengurangi biaya lingkungan adalah dengan menegaskan hak-hak (property right) antara pihak pencemar dan pihak yang dicemari. Dengan adanya kejelasan hak-hak antara kedua belah pihak (yang sama-sama mempunyai hak-hak) dapat mengarah kepada keadaan tawar menawar (bargaining), sehingga dengan cara demikian pencemaran dapat berkurang, karena pihak pencemar tidak akan seenaknya lagi mencemari lingkungan hidup yang dibutuhkan pihak lainnya dalam masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manifestasi fisik dari degradasi lingkungan seperti tingkat laju kehilangan penutup hutan (deforestation) dan erosi tanah serta tingkat pencemaran air dan udara, terjadinya kepadatan kota-kota yang semakin besar, atau kelebihan eksploitasi sumberdaya pantai dan lautan, persoalannya cenderung untuk ditonjolkan dalam berita media masa, tanpa mencoba untuk lebih berupaya guna lebih memahami permasalahan dasar yang sebenarnya. Beberapa pendapat seolah-olah menyarankan bahwa semua degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dapat dihindari dan berguna untuk diatasi dan dicegah. Pendapat tersebut kebanyakan didasarkan hanya melihat kepada gejala-gejala permukaan yang dapat diamati; dan bukannya didasarkan kepada upaya untuk memahami dan mencari penyebab dasarnya; sehingga kebanyakan orang juga cenderung menghindari pendekatan analitik yang mendasar tentang bagaimana cara-cara menanggulangi masalah tersebut, selain hanya menggunakan cara pelarangan kegiatan (melalui peraturan dan undang-undang) yang diperkirakan menimbulkan persoalan, terutama pada keadaan sistem kelembagaan yang masih lemah. Sebagai misal, jika aktivitas pembalakan (logging) yang mengarah kepada terjadinya deforestasi, sepertinya akan masuk akal apabila kejadian tersebut dicegah dengan tindakan melarang pembalakan hutan saja dan pembatasan tersebut oleh penentu kebijaksanaan dipercaya sebagai jalan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi, sekarang telah diketahui bahwa dengan pelarangan pembalakan hutan saja ternyata tidak mampu menghentikan kerusakan hutan dengan

cara menghentikan pembalakan itu sendiri, seperti melalui peraturan pelarangan. Karena meskipun pelarangan, seperti pelarangan ekspor lagi, telah dilakukan dengan SK Menteri, tetapi pembalakan (logging) ternyata terus berlangsung, yang penyebabnya didorong oleh faktor lain, yaitu adanya kebijaksanaan lain yang mendorong tumbuhnya industri pengolahan kayu. Karena SK menteri yang melarang ekspor kayu gelondongan, dengan kebijaksanaan non-tarif tersebut menaikkan harga-harga kayu di dalam negeri yang pada gilirannya telah memacu terjadinya pembalakan hutan tersebut dan menjadi penyebab ketidakseimbangan pembangunan regional. Karena masyarakat di daerah yang semula dapat mengekspor kayu secara langsung, sekarang harus diolah yang kebanyakan industri pengolahannya berada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, agar supaya kita mampu mewujudkan suatu tindakan kebijaksanaan yang lebih tepat yang dapat mengarah kepada pemecahan permasalahan secara lebih jitu, maka analisis fisikal-biologikal, ekonomi dan kelembagaan yang menyangkut permasalahan degradasi sumber-sumberdaya alam perlu ditinjau dan dikaji secara integral. Dengan demikian ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang mampu merangkul ketiga disiplin ilmu di atas perlu dijadikan sebagai inti penelaahan permasalahan, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Untuk jelasnya analisis yang menunjang program pembangunan suatu kawasan atau wilayah (baik kawasan urban maupun hinterland) perlu ditelaah secara menyeluruh dengan analisis keseimbangan ekonomi yang umum (general equilibrium analisis) baik secara sektoral maupun regional.

Ancaman yang berkembang pada terjadinya pencemaran karena pertumbuhan kawasan kota-kota yang cepat terjadi disebabkan karena baik oleh pencemaran industri maupun pencemaran rumah tangga (domestik). Perkembangan kawasan kota di Indonesia mengalami laju yang melebihi 7% per tahun, terutama keadaan transisi kehidupan perkotaan tersebut sedang berlangsung dengan cepat terutama di wilayah Pulau Jawa dan Bali, di mana prosentase penduduk kota telah mencapai 46% dan akan menjadi 80% pada tahun 2030. Keuntungan aglomerasi ekonomi kota yang dapat dicapai oleh bertambahnya skala ekonomi kota ini diperkirakan akan menurun, dengan bersamaan bertambahnya penduduk kota-kota yang secara simultan meningkatkan konsentrasi pencemaran yang berasal dari manusia dan kegiatan ekonomi. Demikian juga jumlah orang-orang yang terkena dampak dari pencemaran tersebut, terutama mereka yang termasuk penduduk miskin yang lemah, mereka kurang/tidak berdaya untuk melindungi diri karena hak-hak mereka yang lemah dalam mempertahankan diri untuk tidak dicemari pihak lain yang lebih kuat. Oleh karena itu pengendalian pencemaran di kawasan perkotaan dengan berbagai insentif ekonomi dan pembangunan organisasi kelembagaan masyarakat yang efektif di wilayah pedesaan maupun kawasan kota menjadi penting.

KESIMPULAN

Dari uraian singkat di atas dapatlah disimpulkan bahwa pentingnya perubahan kearah perbaikan kebijaksanaan yang menyangkut sumberdaya alam dan lingkungan hidup (policy reform) tercernin dari terjadinya restrukturisasi pada bentuk intervensi pemerintah. Restrukturisasi ini terutama meliputi pengarahannya kembali dari terjadinya kegagalan pasar kepada bidang kebijaksanaan yang menjanjikan keberhasilan kebijaksanaan (policy success) yang menuju kepada sistem pembangunan berkelanjutan, yang ternyata mempunyai keterkaitan-keterkaitan yang sangat kompleks. Kompleksitas permasalahan tersebut pada dasarnya dimulai dari terjadinya peningkatan

permintaan (demand) terhadap sumberdaya alam sebagai bahwa dasar industri, yang disebabkan oleh terjadinya pertumbuhan penduduk, perbaikan teknologi dan pertumbuhan ekonomi sedangkan dilain pihak persediaan (supply) sumberdaya alam relatif tetap. Terjadinya excess demand terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan demikian mengarah kepada bertambah langkanya sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan hidup yang menjadi semakin parah yang berlangsung terus dari waktu ke waktu. Persoalan kelangkaan sumberdaya dan kerusakan lingkungan hidup dipertajam lagi oleh kekurang mampuan dalam sistem pengorganisasiannya, baik yang menyangkut organisasi ekonomi maupun kelembagaan sosialnya. Kekurangan-kekurangan tersebut tercermin terutama dari ketidak mampuan dalam membentuk sistem pengorganisasian ekonomi, lebih-lebih di dalam melakukan berbagai penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sebagai akibat dan perubahan dinamis yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, pertumbuhan penduduk. Sehingga dengan perubahan-perubahan dinamis tersebut semestinya sistem-sistem organisasi yang menyangkut pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup semestinya berkoevolusi dengan perubahan yang disebabkan oleh kemajuan pengetahuan dan teknologi yang terjadi.

Penyebab utama dari degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup terletak dari keterpisahan antara kelangkaan dan sistem penentuan harga, manfaat dan biaya, hak-hak dan tanggung jawab, tindakan dan akibat yang ditimbulkannya. Terlalu banyak sumberdaya alam yang tidak jelas hak-hak kepemilikannya dan tidak dihargai secara wajar dalam sistem pasar yang berlaku. Sedangkan sumberdaya lainnya dihargai terlalu rendah, dan pengurasannya malah disubsidi. Mencegah terjadinya kenaikan harga karena bertambahnya kelangkaan sumberdaya akan meningkatkan biaya-biaya sosial yang timbul dari terjadinya distorsi terhadap isyarat-isyarat pasar (market signals) untuk bekerja dengan baik, yang sebenarnya dapat menghalangi terjadinya peningkatan efisiensi, substitusi, konservasi dan inovasi untuk memulihkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran.

Karenanya terjadinya degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup bukan disebabkan karena pertumbuhan ekonomi sendiri, melainkan karena terjadinya kekeliruan dan kegagalan dalam kebijaksanaan dan kegagalan pasar. Beberapa ketidakmampuan sistem pengorganisasian ekonomi tercermin diantaranya dalam bentuk kekeliruan kebijaksanaan (policy failure) yang membuat terjadinya distorsi dari bekerjanya sistem pasar yang efisien melalui subsidi kapital, Batas pagu sukubunga, subsidi pestisida, subsidi energi, pengurangan pajak (tax holiday), kuota dan beberapa hak-hak dan kemucahan-kemudahan yang diberikan pada segolongan penduduk. Kegagalan pasar dan kelangkaan sumberdaya alam tersebut tercermin dari terjadinya akses terbuka, tidak jelasnya hak-hak, terjadinya eksternalitas dan sifat-sifat dari public good, pasar yang bersifat monopoli, tingginya biaya-biaya transaksi, konsesi-konsesi perusahaan sumberdaya jangka pendek, keputusan sistem pasar yang bersifat jangka pendek dan banyaknya sumberdaya alam yang tidak dinilai (unpriced values).

Sedangkan koreksi terhadap kegagalan pasar dapat dilakukan melalui pensertifikatan hak-hak atas sumberdaya terutama hak-hak lahan, pemberian lisensi yang dilakukan secara terbuka dan bersaing, penentuan harga lahan dan air yang lebih baik, perpajakan terhadap pencemaran, subsidi terhadap eksternalitas positif (seperti dalam penyediaan jalan, fasilitas pendidikan, taman-taman dan udara dan air bersih yang termasuk kedalam golongan public good), perpajakan terhadap rente (surplus



keuntungan) dari sumberdaya alam seperti rent lahan dan sumberdaya perairan dan hasil yang diharapkan dari perbaikan sistem pasar akan membuahakan hak-hak (property right) yang lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar Online. 2005. *Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kaitannya dengan Ekonomi dan Lingkungan*. Available at <http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=16207>
- Fauzi, Akhmad. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Garrett Hardin, 1968. *The Tragedy of the Commons*. Science 162, December 1968, pp. 1243-48.
- Sanim, Bunasor. 2005. *Kebijakan*. Institut Pertanian Bogor.
- Scientific American, 1990. *Managing Planet Earth*. W.H. Freeman and Company, New York.
- Van den Bergh, Jeroen C.J.M. 1999. *Handbook of Environmental and Resource Economics*. Edward Elgar Publishing Limited Glensanda House Montpellier Parade Cheltenham Glos GL50 1UA. Massachusetts USA.
- WALHI. 2004. *Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup*. Available at http://www.walhi.or.id/kampanye/psda/adv_psdalh_info/.
- Yakin, Addinul. 2004. *Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*. Akademi Pressindo. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Available at <http://www.dgtl.esdm.go.id/fileperaturan/27.pdf>.
- Indonesia Expanding Horizonz, Indonesia Environment Monitor 2003. *The World Bank*. Available at <http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1106130305439/617331-110769011447/810296-1110769073153/environment.pdf>.
-